



Research Article

Pengaruh Aspek Hukum Dan Etika Bisnis Terhadap Keberlanjutan Usaha Di Era Digital

Riskiyatul Hasanah¹, Yuni Dhea Utari², Nurfitri³, Delia Desvianti⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; riskiyatulhasanah667@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; yunidheautari@yahoo.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; nurfitri48904@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; deliadesviantio@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 02, 2024

Revised : April 08, 2024

Accepted : May 23, 2024

Available online : June 04, 2024

How to Cite M. Riskiyatul Hasanah, Yuni Dhea Utari, Nurfitri, & Delia Desvianti. (2024). The Influence of Legal Aspects and Business Ethics on Business Sustainability in the Digital Era. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 2(3), 95–110. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i3.33>

The Influence of Legal Aspects and Business Ethics on Business Sustainability in the Digital Era

Abstract. This article discusses the importance of legal and ethical aspects of business in business sustainability in the dynamic and changing digital era. This research uses a normative juridical approach to examine law as a set of regulations that regulate human life. Legal aspects in digital business include dependence on digital technology, such as e-commerce, social media, and other applications, which require companies to comply with various legal requirements such as data privacy regulations, copyright, and data security to avoid legal risks that can disrupt business continuity. . The ethical aspect of business emphasizes the importance of building customer trust and loyalty as well as

business reputation by interacting ethically with customers, business partners and society. Business ethics in the digital era also pays attention to aspects such as data security and privacy, transparency, accountability in artificial intelligence, honesty in digital marketing, and legal compliance. Business sustainability in the digital era requires a deep understanding of applicable laws and regulations, building a culture of compliance, implementing technology to support compliance and transparency, and collaborating with other stakeholders. Implementing good legal aspects and business ethics can increase consumer trust, strengthen reputation, and increase business value in ensuring business sustainability in the digital era. In conclusion, the importance of implementing good legal aspects and business ethics in maintaining business sustainability in the digital era not only helps companies comply with applicable regulations and regulations, but also builds trust, a good reputation and sustainable business value for the company.

Keywords: Legal Aspects, Business Ethics, Business Sustainability, Digital Era.

Abstrak. Artikel ini membahas tentang pentingnya aspek hukum dan etika bisnis dalam keberlanjutan usaha di era digital yang dinamis dan berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur kehidupan manusia. Aspek hukum dalam bisnis digital mencakup ketergantungan pada teknologi digital, seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi lainnya, yang mengharuskan perusahaan mematuhi berbagai persyaratan hukum seperti regulasi privasi data, hak cipta, dan keamanan data untuk menghindari risiko hukum yang dapat mengganggu keberlanjutan bisnis. Aspek etika bisnis menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta reputasi bisnis dengan berinteraksi secara etis dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Etika bisnis di era digital juga memperhatikan aspek seperti keamanan data dan privasi, transparansi, pertanggungjawaban dalam kecerdasan buatan, kejujuran dalam pemasaran digital, dan kepatuhan hukum. Keberlanjutan usaha di era digital membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pembangunan budaya kepatuhan, penerapan teknologi untuk mendukung kepatuhan dan transparansi, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan aspek hukum dan etika bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi, dan meningkatkan nilai bisnis dalam memastikan keberlanjutan usaha di era digital. kesimpulannya, pentingnya penerapan aspek hukum dan etika bisnis yang baik dalam menjaga keberlanjutan usaha di era digital tidak hanya membantu perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, tetapi juga membangun kepercayaan, reputasi yang baik, dan nilai bisnis yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Etika Binis, Keberlanjutan Usaha, Era Digital.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang sangat dinamis dan berubah, bisnis harus secara terus-menerus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai keberlanjutan bisnis adalah pengaruh aspek hukum dan etika bisnis. Dalam konteks bisnis digital, hukum dan etika bisnis memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan usaha. Dalam jurnal ini, kita akan membahas bagaimana aspek hukum dan etika bisnis mempengaruhi keberlanjutan bisnis di era digital.

Pengaruh aspek hukum pada bisnis digital sangat luas dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi digital, seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi lainnya. Dalam proses ini, bisnis harus memenuhi berbagai persyaratan hukum yang berbeda-beda,

seperti regulasi privasi data, hak cipta, dan keamanan data. Ketergantungan pada teknologi digital juga memungkinkan pelanggaran hukum yang lebih mudah terdeteksi dan menyebar. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami dan mematuhi hukum yang relevan untuk menghindari risiko hukum yang dapat mengganggu keberlanjutan bisnis.

Selain hukum, aspek etika bisnis juga sangat penting dalam mencapai keberlanjutan bisnis di era digital. Etika bisnis memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Dalam era digital, etika bisnis memungkinkan perusahaan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta meningkatkan reputasi bisnis. Namun, pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian bisnis yang signifikan dan kerusakan reputasi.

Dalam jurnal ini, kita akan membahas bagaimana aspek hukum dan etika bisnis mempengaruhi keberlanjutan bisnis di era digital. Kita akan mengkaji bagaimana perusahaan dapat memenuhi persyaratan hukum yang relevan dan membangun etika bisnis yang baik untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Kita juga akan membahas bagaimana pelanggaran hukum dan etika bisnis dapat mengganggu keberlanjutan bisnis dan bagaimana perusahaan dapat menghindari risiko tersebut. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana aspek hukum dan etika bisnis mempengaruhi keberlanjutan bisnis di era digital¹

Etika bisnis di era teknologi digital menjadi semakin penting karena teknologi telah mengubah cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan memengaruhi masyarakat secara lebih luas. Beberapa aspek penting etika bisnis di era teknologi digital adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Data dan Privasi:
Perusahaan harus menjaga keamanan data pelanggan dan karyawan dengan sangat serius. Ini termasuk melindungi data pribadi, menghindari pelanggaran data, dan memberikan kendali kepada individu atas informasi mereka.
2. Transparansi:
Perusahaan harus transparan dalam cara mereka mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data pelanggan. Ini mencakup pemberian informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pelanggan tentang praktik privasi mereka.
3. Pertanggungjawaban dalam Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI):
Penggunaan AI dalam bisnis harus dilakukan secara etis. Ini termasuk menghindari diskriminasi, bias, dan dampak negatif pada pekerja atau konsumen. Perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh sistem AI mereka.
4. Kejujuran dalam Pemasaran Digital:

¹ Hudi Karno Sabowo, "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, No. 1 (30 Oktober 2019), <https://doi.org/10.36356/Hdm.V17i1.1283>.

Praktik pemasaran digital yang jujur dan transparan penting. Perusahaan harus menghindari praktik spam, penipuan, atau manipulasi dalam upaya pemasaran mereka

5. Kepatuhan Hukum:

Perusahaan harus mematuhi semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan bisnis mereka di dunia digital. Hal ini termasuk patuh terhadap hukum privasi data, hak cipta, dan lainnya.

Belajar etika bisnis di era teknologi digital memiliki manfaat yang signifikan, baik untuk individu maupun perusahaan. Secara keseluruhan, belajar etika bisnis di era teknologi digital membantu perusahaan mencapai keberlanjutan jangka panjang, meminimalkan risiko, dan menjaga hubungan positif dengan semua pemangku kepentingan²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

PEMBAHASAN

Aspek hukum merujuk pada berbagai hal yang terkait dengan hukum dalam suatu konteks tertentu. Ini mencakup peraturan, kebijakan, prosedur hukum, dan interpretasi hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Peraturan dan kebijakan hukum adalah dasar yang memastikan bahwa semua aktivitas dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur. Prosedur hukum menyediakan mekanisme untuk penerapan dan penegakan hukum, sementara interpretasi hukum memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi tertentu.

Aspek hukum juga mencakup berbagai cabang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum administrasi, dan lain sebagainya. Hukum pidana berfokus pada pelanggaran yang merugikan masyarakat dan menetapkan hukuman bagi pelakunya, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara individu dan entitas dalam masyarakat. Hukum konstitusi menetapkan kerangka dasar pemerintahan dan hak-hak fundamental warga negara, sementara hukum administrasi mengatur operasi dan prosedur lembaga-lembaga pemerintahan. Setiap cabang hukum ini berperan dalam membentuk sistem hukum yang menyeluruh dan koheren, yang memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat³.

Dalam konteks yang lebih spesifik, aspek hukum juga dapat merujuk pada analisis terhadap suatu permasalahan hukum dan penyelesaian sengketa hukum. Analisis hukum melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap kasus tertentu untuk

² Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis" 12 (2017).

³ Zulhamdi Zulhamdi Dan Husnaini Husnaini, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, No. 1 (30 Juni 2022): 75-84, <https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.Viii.892>.

menentukan penerapan hukum yang tepat, sedangkan penyelesaian sengketa hukum menyediakan mekanisme bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang adil. Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang sah dan adil, menghindari konflik berkepanjangan yang bisa merusak hubungan sosial atau bisnis.

Perlindungan hak dan kewajiban individu juga merupakan bagian penting dari aspek hukum. Ini memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, lingkungan, teknologi, dan lain sebagainya, hukum memainkan peran penting dalam melindungi hak dan kewajiban individu. Misalnya, dalam dunia bisnis, hukum melindungi hak pemilik usaha, pekerja, dan konsumen. Dalam bidang lingkungan, hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Aspek hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang baik terhadap aspek hukum, individu maupun institusi dapat berinteraksi dan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil di mana semua orang tahu hak dan kewajibannya, serta tahu bagaimana menegakkan hak-hak mereka. Kepatuhan terhadap hukum juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan⁴.

Keberlanjutan usaha di era digital perlu memperhatikan beberapa aspek hukum, antara lain:

Hukum Hak Cipta

Hukum hak cipta dan kekayaan intelektual adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur perlindungan atas karya-karya intelektual dan inovasi. Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dipatuhi, terutama dalam era digital di mana konten-konten seperti software, musik, dan konten media lainnya mudah disebarkan dan diakses secara luas. Hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya-karya kreatif seperti tulisan, gambar, musik, film, dan software. Dengan adanya hak cipta, pencipta karya memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya-karya mereka. Ini memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan konten baru⁵.

Sementara itu, kekayaan intelektual meliputi lebih dari sekadar hak cipta. Ini juga mencakup paten (untuk penemuan baru dan inovasi), merek dagang (untuk melindungi merek dan identitas bisnis), rahasia dagang (untuk informasi rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif), dan desain industri (untuk desain produk). Dalam konteks konten digital, pemahaman yang baik tentang hukum hak cipta dan kekayaan intelektual sangat penting. Hal ini membantu menghindari

⁴ Mudassir Mathar, "Aspek Hukum Usaha Waralaba Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, No. 1 (26 Agustus 2016), <https://doi.org/10.30984/As.V4i1.211>.

⁵ Siti Fatimah Dkk., "Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 5 (25 Mei 2022): 609–20, <https://doi.org/10.36418/Jist.V3i5.425>.

pelanggaran hak cipta, pencurian konten, dan sengketa hukum terkait penggunaan konten digital. Para pemilik konten perlu memahami hak-hak mereka dan cara melindungi karya-karya mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain⁶.

Dengan mematuhi hukum hak cipta dan kekayaan intelektual, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan perlindungan terhadap hak-hak para pencipta. Ini juga memastikan bahwa nilai dari karya-karya intelektual dihargai dan dijaga dengan baik dalam era digital yang terus berkembang⁷.

Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah bagian penting dari regulasi ekonomi yang bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum ini mengatur perilaku perusahaan dalam pasar untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan persaingan dan konsumen, seperti monopoli dan oligopoli. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai pasar secara penuh atau mendominasi pasar tanpa adanya pesaing yang signifikan. Praktik monopoli dapat merugikan konsumen dengan menaikkan harga secara tidak wajar, menurunkan kualitas produk atau layanan, serta menghambat inovasi dan pilihan konsumen.

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah terbentuknya monopoli dan mengatur perilaku perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar. Sementara itu, oligopoli terjadi ketika pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling berinteraksi dan memengaruhi harga pasar. Praktik-praktik oligopoli seperti kartel (kesepakatan antar perusahaan untuk membatasi persaingan) dapat merugikan konsumen dengan menaikkan harga secara bersama-sama dan mengurangi pilihan konsumen. Hukum persaingan usaha juga mengatur praktik oligopoli untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

Dengan mematuhi hukum persaingan usaha, perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara transparan, jujur, dan adil dalam pasar. Mereka diwajibkan untuk tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan persaingan, seperti penyalahgunaan kekuatan pasar, kolusi, diskriminasi harga, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, inovatif, dan memberikan manfaat bagi konsumen serta perekonomian secara keseluruhan.

Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah serangkaian peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dalam interaksi mereka dengan perusahaan atau penyedia layanan. Hukum ini mengatur kewajiban

⁶ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 3 (3 April 2017), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10n03.789>.

⁷ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (20 April 2021): 9-17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan transparan kepada konsumen tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan. Perusahaan diharapkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada konsumen mengenai harga, kualitas, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan penggunaan produk atau layanan. Hal ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang informasi dan memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka⁸.

Selain itu, hukum perlindungan konsumen juga menetapkan kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara adil dan transparan. Jika terjadi masalah atau ketidakpuasan konsumen terhadap produk atau layanan yang diberikan, perusahaan diharapkan untuk memberikan respon yang cepat, efektif, dan memenuhi kebutuhan konsumen⁹. Ini termasuk proses pengaduan, pengembalian barang, pelayanan purna jual, dan kompensasi jika diperlukan¹⁰.

Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, konsumen memiliki perlindungan hukum terhadap praktik-praktik penipuan, penipuan, atau ketidakjujuran dari pihak perusahaan. Hukum ini juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, saling menguntungkan, dan memperkuat kepercayaan antara perusahaan dan konsumen¹¹.

Aspek etika bisnis

Aspek etika bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha di era digital saat ini. Selain mematuhi hukum yang berlaku, perusahaan juga perlu memperhatikan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasional dan interaksinya dengan berbagai pihak terkait. Aspek etika bisnis mencakup berbagai hal, mulai dari transparansi, akuntabilitas, kejujuran, keadilan, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Dengan memperhatikan aspek etika bisnis ini, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memperkuat hubungan dengan stakeholders, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Aspek hukum dalam bisnis yaitu:

1. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Aspek ini mencakup berbagai bidang, termasuk keuangan, manajemen, kebijakan, dan praktik bisnis perusahaan. Dalam konteks keuangan,

⁸ Dr Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia" 5 (2015).

⁹ Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, No. 1 (25 Juli 2021): 12-18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

¹⁰ Ali Mansyur Dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (8 Juli 2016): 1, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>.

¹¹ Chandra Adi Gunawan Putra Dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," . . Cc 5 (T.T.).

transparansi berarti perusahaan menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini memungkinkan para investor, pemegang saham, dan publik untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang tepat. Transparansi dalam manajemen mencakup pengungkapan informasi mengenai struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan tanggung jawab individu di dalam perusahaan.

Dengan menjadi transparan, perusahaan memberikan kepercayaan kepada stakeholders bahwa mereka beroperasi dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat luas. Ketika perusahaan transparan tentang operasional dan tujuan mereka, para stakeholders merasa lebih yakin untuk berinvestasi dan mendukung perusahaan tersebut. Kepercayaan ini juga memperkuat reputasi perusahaan di pasar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Transparansi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dengan meminimalisir risiko konflik kepentingan dan praktek bisnis yang tidak etis. Dalam lingkungan bisnis yang transparan, semua tindakan dan keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi secara terbuka, perusahaan juga menunjukkan komitmen mereka terhadap etika bisnis dan tata kelola yang baik, yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Selain itu, transparansi mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri. Ketika informasi mengenai performa dan praktek bisnis perusahaan terbuka untuk evaluasi publik, perusahaan lebih terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk atau layanan mereka. Kritik dan masukan dari stakeholders dapat menjadi sumber berharga bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang.

Dalam era digital saat ini, transparansi menjadi semakin penting dengan adanya teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Perusahaan yang tidak transparan berisiko kehilangan kepercayaan dari publik dan menghadapi konsekuensi reputasi yang serius. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dalam semua aspek bisnis menjadi suatu keharusan. Perusahaan yang mengadopsi transparansi sebagai bagian dari budaya mereka akan lebih siap menghadapi tantangan bisnis modern dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan di masa depan.

2. akuntabilitas juga merupakan nilai penting dalam etika bisnis

Akuntabilitas merupakan nilai penting dalam etika bisnis, karena memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks bisnis, akuntabilitas berarti bahwa perusahaan dan karyawannya memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas dan transparansi. Mereka harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua keputusan dan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat luas. Ini tidak hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga mendorong perilaku yang etis di seluruh organisasi.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Ketika perusahaan bertindak secara akuntabel, mereka menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial. Ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Investor juga lebih cenderung berinvestasi di perusahaan yang menunjukkan tingkat akuntabilitas tinggi, karena mereka merasa lebih yakin bahwa dana mereka dikelola dengan bijaksana dan etis.

Selain itu, akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi masalah etika dalam bisnis. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, perusahaan dapat mendeteksi dan menanggulangi penyimpangan etika lebih awal. Ini termasuk kebijakan pelaporan internal yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran tanpa takut akan reprisal. Budaya akuntabilitas ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan adil, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk bertindak secara etis.

Di sisi lain, akuntabilitas juga berkontribusi pada efisiensi operasional. Ketika setiap individu dan departemen bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka cenderung bekerja lebih efektif dan efisien. Mereka lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Akuntabilitas mendorong kinerja yang lebih tinggi karena karyawan menyadari bahwa kontribusi mereka dinilai dan dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, akuntabilitas adalah landasan penting dalam etika bisnis yang mendukung kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban mereka kepada pemangku kepentingan tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan. Nilai ini mencakup peningkatan reputasi, kepercayaan investor, loyalitas pelanggan, dan efisiensi operasional yang lebih baik, semuanya berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan.

3. Keadilan juga merupakan nilai yang sangat penting dalam etika bisnis.

Keadilan juga merupakan nilai yang sangat penting dalam etika bisnis, karena prinsip ini memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan ketidakberpihakan. Dalam konteks bisnis, keadilan berarti bahwa setiap individu atau kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Ini termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, serta komunitas di mana perusahaan beroperasi. Keadilan memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau

diskriminatif, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Penerapan keadilan dalam hubungan kerja sangat penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Ketika karyawan merasa diperlakukan dengan adil dalam hal upah, kesempatan promosi, dan pengembangan karir, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaan mereka. Perusahaan yang mempraktikkan keadilan dalam kebijakan SDM-nya akan melihat peningkatan dalam produktivitas dan pengurangan turnover karyawan. Keadilan dalam tempat kerja juga mencakup perlakuan yang adil dalam menangani keluhan atau perselisihan, memastikan setiap masalah diselesaikan secara objektif dan tanpa bias.

Di sisi pelanggan, keadilan berarti memberikan layanan yang konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap pelanggan harus mendapatkan kualitas produk dan layanan yang sama tanpa memandang latar belakang mereka. Perusahaan yang menerapkan prinsip keadilan dalam layanan pelanggan akan lebih mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Pelanggan yang merasa diperlakukan dengan adil lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain, yang berkontribusi pada reputasi positif dan pertumbuhan bisnis.

Keadilan juga penting dalam hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis. Perusahaan yang beroperasi dengan keadilan akan memastikan bahwa semua kesepakatan dan kontrak dilakukan secara transparan dan adil. Ini termasuk memberikan pembayaran tepat waktu dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Hubungan yang adil dengan pemasok dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pasokan, serta menciptakan kerjasama yang lebih erat dan saling menguntungkan. Keadilan dalam transaksi bisnis juga mengurangi risiko konflik dan sengketa hukum.

Secara keseluruhan, keadilan adalah fondasi penting dalam etika bisnis yang mendukung keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan menegakkan prinsip keadilan, perusahaan tidak hanya menciptakan lingkungan yang positif bagi karyawan dan pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan komunitas. Hal ini menghasilkan keuntungan berkelanjutan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Keadilan, dengan demikian, merupakan elemen kunci dalam menciptakan dan memelihara integritas dan kepercayaan dalam dunia bisnis.

4. Kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan aspek penting dalam etika bisnis

Kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan aspek penting dalam etika bisnis, karena mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan planet kita. Dalam dunia bisnis modern, tanggung jawab lingkungan tidak lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungannya menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian alam dan keberlanjutan jangka

panjang. Ini melibatkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan sumber daya secara efisien, dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Penerapan prinsip kepedulian lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen. Saat ini, semakin banyak konsumen yang peduli dengan masalah lingkungan dan cenderung memilih produk dan layanan dari perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, perusahaan dapat menarik segmen pasar yang sadar lingkungan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran yang menyoroti inisiatif hijau perusahaan dapat memperkuat citra merek dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

Selain manfaat reputasi, kepedulian terhadap lingkungan juga dapat menghasilkan efisiensi operasional dan penghematan biaya. Misalnya, penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan praktik daur ulang dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi mereka seringkali menemukan bahwa mereka tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inisiatif lingkungan yang efektif dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang mahal dan tidak terbarukan.

Di sisi lain, kepedulian terhadap lingkungan juga penting dalam memenuhi peraturan dan standar yang semakin ketat terkait lingkungan. Pemerintah di banyak negara telah menetapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mematuhi dan melampaui persyaratan ini, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan denda yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan. Lebih dari itu, perusahaan yang proaktif dalam mengelola dampak lingkungan mereka seringkali mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, serta dapat memanfaatkan insentif dan subsidi yang ditawarkan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan komponen esensial dalam etika bisnis yang mendukung keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap pelestarian alam, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab moral, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Nilai ini mencakup peningkatan reputasi, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif harus mengintegrasikan kepedulian lingkungan ke dalam strategi dan operasi.

Keberlanjutan Usaha Di Era Digital

Keberlanjutan usaha di era digital sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya peraturan-peraturan yang relevan dengan industri mereka. Hal ini termasuk undang-undang tentang perlindungan data, hak kekayaan intelektual, serta peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Pemahaman ini bukan hanya penting untuk menghindari sanksi

hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain memahami peraturan, membangun budaya kepatuhan dalam perusahaan merupakan kunci keberlanjutan usaha. Budaya kepatuhan ini harus tercermin dalam setiap aspek operasional perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terbawah. Dengan memiliki budaya kepatuhan yang kuat, perusahaan dapat memastikan bahwa semua karyawan bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan. Ini juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang etis dan berintegritas.

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan di era digital. Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai alat teknologi seperti sistem manajemen kepatuhan, perangkat lunak pemantauan, dan analitik data untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan audit internal secara lebih efisien dan mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan preventif yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan¹².

Membangun hubungan yang transparan dan saling percaya dengan pelanggan juga merupakan aspek krusial dalam keberlanjutan usaha. Transparansi dalam komunikasi dan operasi bisnis akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan, serta memastikan bahwa pelanggan merasa aman dan terlindungi dalam setiap transaksi. Dengan kepercayaan yang tinggi, pelanggan cenderung lebih loyal dan dapat menjadi advokat bagi perusahaan.

Akhirnya, bertindak secara etis dan bertanggung jawab adalah fondasi dari keberlanjutan usaha. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis yang mereka ambil. Tindakan yang etis dan bertanggung jawab tidak hanya meningkatkan citra perusahaan di mata publik, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang dalam era digital yang terus berkembang.

Penerapan Aspek Hukum Dan Etika Bisnis Terhadap Keberlanjutan Usaha Di Era Digital

Meningkatkan kepercayaan konsumen adalah aspek yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Konsumen cenderung lebih memilih membeli dari perusahaan yang mereka percayai menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ketika perusahaan memperlihatkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial, hal ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi konsumen. Mereka merasa bahwa uang yang mereka keluarkan tidak hanya digunakan untuk membeli produk atau layanan, tetapi juga mendukung nilai-nilai yang mereka pedulikan. Sebagai hasilnya, perusahaan dengan reputasi etis yang kuat

¹² Mirza Mar'ali Dan Priliyani Nugroho Putri, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia" 9 (2021).

seringkali mengalami peningkatan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, menjalankan bisnis dengan integritas juga dapat memperkuat reputasi perusahaan. Reputasi yang baik adalah aset berharga yang dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan pelanggan serta mitra bisnis. Di era digital ini, informasi menyebar dengan cepat dan reputasi perusahaan dapat dengan mudah terpengaruh oleh tindakan positif atau negatif. Bisnis yang dikenal sebagai etis dan bertanggung jawab cenderung mendapatkan ulasan positif dan dukungan publik, yang dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik mereka di pasar. Reputasi yang baik juga mempermudah perusahaan dalam menjalin kemitraan strategis dan mendapatkan peluang bisnis baru, karena mitra bisnis cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki track record yang solid dan dapat diandalkan.

Terakhir, menjalankan bisnis dengan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku tidak hanya penting untuk menghindari risiko hukum tetapi juga untuk meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. Kepatuhan terhadap peraturan membantu perusahaan menghindari sanksi hukum dan denda yang dapat merugikan finansial serta merusak reputasi. Selain itu, investor cenderung lebih tertarik pada bisnis yang etis dan berkelanjutan karena mereka melihat nilai jangka panjang yang lebih tinggi dalam perusahaan semacam itu. Bisnis yang memiliki komitmen terhadap etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan biasanya dipandang lebih stabil dan berisiko rendah, sehingga lebih menarik bagi investor yang mencari investasi yang aman dan berpotensi memberikan imbal hasil yang baik. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan nilai bisnis dan memberikan keuntungan kompetitif di pasar.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana bisnis dapat menerapkan aspek hukum dan etika bisnis dalam kegiatan mereka di era digital:

1. Membuat Kebijakan Privasi yang Jelas dan Mudah Dipahami

Kebijakan privasi harus menjelaskan bagaimana bisnis mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi. Ini mencakup informasi tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, cara data tersebut digunakan, serta kepada siapa data tersebut dapat diungkapkan. Implementasi:

- **Transparansi:** Bisnis harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang kebijakan privasi di situs web mereka dan aplikasi digital
- **Kepatuhan:** Memastikan kebijakan privasi mematuhi regulasi privasi data yang relevan, seperti GDPR di Eropa atau CCPA di California
- **Pembaruan Berkala:** Secara berkala memperbarui kebijakan privasi untuk mencerminkan perubahan dalam praktik pengumpulan data atau perubahan hukum.

2. Memberikan Pelatihan kepada Karyawan tentang Etika Digital

Karyawan harus dilatih tentang cara menggunakan teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab, termasuk penanganan data pribadi dan penggunaan media sosial. Implementasi:

- Program Pelatihan: Mengadakan program pelatihan rutin tentang etika digital, termasuk studi kasus dan simulasi.
- Kode Etik: Mengembangkan dan mendistribusikan kode etik digital yang harus dipahami dan diikuti oleh semua karyawan.
- Sumber Daya: Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk karyawan yang menghadapi dilema etika terkait teknologi digital¹³.

3. Membangun Budaya Kepatuhan dalam Organisasi

Bisnis harus membangun budaya di mana kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah prioritas utama. Ini berarti bahwa semua karyawan memahami pentingnya kepatuhan dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga standar etika dan hukum. Implementasi

- Kepemimpinan Teladan: Pemimpin bisnis harus menunjukkan komitmen mereka terhadap kepatuhan melalui tindakan dan keputusan mereka.
- Pengawasan dan Evaluasi: Membuat mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan karyawan terhadap hukum dan regulasi.
- Sistem Pelaporan: Menerapkan sistem pelaporan anonim bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika atau hukum tanpa rasa takut akan pembalasan.

4. Bekerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Lainnya

Bisnis harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat sipil, untuk mengembangkan standar etika dan regulasi yang terkait dengan teknologi digital. Implementasi:

- Kolaborasi: Mengikuti dan berpartisipasi dalam inisiatif dan forum industri yang membahas etika dan regulasi teknologi digital.
- Konsultasi: Bekerja sama dengan ahli hukum dan etika untuk memastikan praktik bisnis sejalan dengan standar terbaik.
- Partisipasi dalam Pengembangan Kebijakan: Berkontribusi dalam proses pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan teknologi dan etika digital.

5. Menggunakan Teknologi untuk Kepatuhan dan Transparansi

Teknologi dapat digunakan untuk mendukung kepatuhan dan transparansi dalam bisnis, misalnya dengan memanfaatkan sistem otomatis untuk mengelola data pribadi dan memastikan pelaporan yang akurat. Implementasi

- Sistem Manajemen Data: Mengimplementasikan sistem manajemen data yang memastikan data pribadi disimpan dan dikelola sesuai dengan regulasi.

¹³ Rimarsha Agitta Dan Putu Ade Harriestha Martana, "Perang Tarif Penyedia Layanan Ojek Dalam Jaringan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (27 Desember 2020): 92, <https://doi.org/10.24843/Ks.2020.V09.I01.P08>.

- Audit dan Pelaporan Otomatis: Menggunakan alat otomatis untuk mengaudit proses bisnis dan menghasilkan laporan kepatuhan secara teratur.
- Blockchain: Memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan integritas data dalam transaksi bisnis.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, bisnis dapat memastikan bahwa mereka beroperasi secara etis dan mematuhi regulasi yang berlaku di era digital, sekaligus membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

KESIMPULAN

Aspek hukum dalam bisnis mencakup berbagai hal terkait dengan hukum, seperti peraturan, kebijakan, prosedur hukum, dan interpretasi hukum. Peraturan dan kebijakan hukum memastikan tertibnya aktivitas dalam masyarakat, sementara prosedur hukum menyediakan mekanisme penegakan hukum. Cabang-cabang hukum seperti hukum pidana, perdata, konstitusi, dan administrasi memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum yang koheren dan menyeluruh. Dalam konteks bisnis di era digital, memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha. Ini termasuk hukum hak cipta, hukum persaingan usaha, dan hukum perlindungan konsumen. Mematuhi hukum ini membantu perusahaan menghindari pelanggaran dan sengketa, serta membangun kepercayaan konsumen¹⁴.

Selain aspek hukum, etika bisnis juga sangat penting. Ini mencakup nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Transparansi membantu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, akuntabilitas memastikan bahwa tindakan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan, keadilan memastikan perlakuan yang setara untuk semua, dan kepedulian terhadap lingkungan menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan.

Keberlanjutan usaha di era digital sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan penerapan etika bisnis. Teknologi dapat membantu meningkatkan kepatuhan, sementara membangun hubungan yang transparan dan saling percaya dengan pelanggan sangat penting. Bertindak secara etis dan bertanggung jawab mendukung keberlanjutan jangka panjang dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Secara keseluruhan, penerapan aspek hukum dan etika bisnis yang baik meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi, dan meningkatkan nilai bisnis. Perusahaan yang mematuhi hukum dan beretika cenderung lebih menarik bagi investor dan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang di era digital¹⁵.

¹⁴ Mansyur Dan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional."

¹⁵ Tubagus Dicky Faldy Syahid Noor, Yulia Nurendah, Dan Weman Suardy, "Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja Umkm Dari Perspektif Marketing," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 9, No. 3 (30 Desember 2021): 627-40, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.921>.

DAFTAR PUSTAKA

- Agitta, Rimarsha, Dan Putu Ade Harriestha Martana. "Perang Tarif Penyedia Layanan Ojek Dalam Jaringan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (27 Desember 2020): 92. <https://doi.org/10.24843/Ks.2020.V09.I01.P08>.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, Dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, No. 1 (25 Juli 2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/Jmbjayakarta.V3i1.85>.
- Fatimah, Siti, Elisa Widiyanti, Rista Emmy Azizah, Westri Maharani, Dan Muhammad Fahmi. "Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 5 (25 Mei 2022): 609–20. <https://doi.org/10.36418/Jist.V3i5.425>.
- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis" 12 (2017).
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 3 (3 April 2017). <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V10n03.789>.
- Mansyur, Ali, Dan Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (8 Juli 2016): 1. <https://doi.org/10.26532/Jph.V2i1.1411>.
- Mar'ali, Mirza, Dan Priliyani Nugroho Putri. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia" 9 (2021).
- Mathar, Mudassir. "Aspek Hukum Usaha Waralaba Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, No. 1 (26 Agustus 2016). <https://doi.org/10.30984/As.V4i1.211>.
- Noor, Tubagus Dicky Faldy Syahid, Yulia Nurendah, Dan Weman Suardy. "Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja Umkm Dari Perspektif Marketing." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 9, No. 3 (30 Desember 2021): 627–40. <https://doi.org/10.37641/Jimkes.V9i3.921>.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, Dan I Nyoman Putu Budiarta. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." . . Cc 5 (T.T.).
- Sabowo, Hudi Karno. "Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, No. 1 (30 Oktober 2019). <https://doi.org/10.36356/Hdm.V17i1.1283>.
- Sinaga, Dr Niru Anita. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia" 5 (2015).
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (20 April 2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/Rechten.V3i1.22>.
- Zulhamdi, Zulhamdi, Dan Husnaini Husnaini. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, No. 1 (30 Juni 2022): 75–84. <https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.V1i1.892>.